

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul, Muktie Fadjar. Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi, Malang: Setara Press, 2013.
- Alrasid, Harun. Pemilihan Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997.
- Alrasid, Harun. Pengisian Jabatan Presiden. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Amal, Ichlasul. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cipto Handoyo, B. Hestu. Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ghafur, Jamaludin, dan Allan Fatchan G. W. *Presidential threshold*, Malang: Setara Press. 2019.
- Hadikusuma, Hilman. Metodologi Pembuatan kertas kerja/skripsi Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju, 1995.
- Hanitijo S, Ronny. Metodologi Penelitian dan Yurimetri. Semarang: Ghalia Indonesia, 1990.
- Huckshom, Robert. *Political Parties in America*, Brooks/Cole, Monterey: 1984.
- Isra, Saldi. Sistem Pemerintahan Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Partai Politik, Jakarta: Kencana, 2020.

- Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Kartawidjaja, Pipit R. *Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper)*. Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983.
- Lukum, Roni. *Pilkada Langsung dan Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Menuju Pembangunan Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Legalitas*, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, cetakan keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Murtopo, Ali. *Strategi Pembangunan Nasional*. CSIS, 1981.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Randireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokus Media, 2007.
- R. Balll, Alan dan B Guy Peters sebagaimana dikutip oleh Saldi, Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- R. Saragih, Bintan. *Lembaga-lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1980.
- Sitepu, P. Anthonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta Graha Ilmu, 2012.
- Sodikin. *HUKUM PEMILU: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing. 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Tambunan, A.S.S. Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Bandung: Binacipta, 1995.

Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Yusa Djuyandi. Pengantar Ilmu Politik. Depok: Rajawali Press. 2017

### **Jurnal**

Antamaeng, I.V. 2019. Implikasi *Presidential threshold* Terhadap Pemilu Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum*, Vol. 7, No.3.

Armia, Muhammad Siddiq., Nafrizal., Fitriadi, M. Deni., & Maulana, Iqbal. 2016. Penghapusan *Presidential threshold* sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.1, No.26..

Fikri S., Riqiey B., dan Janah M., Problematika Konstitusionalitas *Presidential threshold* di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*. 2022. Vol 7, No. 1, hlm. 1-24.

Firna Handayani, S., Ulum, B. and Armansyah, Y. “Analisis Tentang Aturan *Presidential threshold* Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019” UIN Sulthan Thaha.2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/2853/1/FIRNA%20HANDAYANI%20-%20Firna%20Handayani.pdf>

Hapsari, Y.D.P. dan Saraswati, R. 2023. Dampak Pelaksanaan *Presidential threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 5, No.1, hlm.70-84.

I Dewa Made Putra. Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal IUS*. Vol. II, No. 6, hlm. 565.

Indah Virginia. 2019. Implikasi *Presidential threshold* Terhadap Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum*. Vol VII, No. 3, hlm. 41-48.

Janpatar Simamora. 2014. Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 3, No. 1, hlm. 15.

- Jazuli Juwaini. 2015. Menjadikan Demokrasi Bermakna. *Darussalam Publishing*. hlm. 25-26.
- Jenedri M. Gaffar. 2013. Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, hlm 11.
- M. Rafly, E. Haskar, dan N.F Farda. 2021. Penerapan *Presidential threshold* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. *Otentik Law Journal*. Vol. 1, No. 1.
- Mukhtarrija, M., Handayani, I.G.A.K.R. and Riwanto, A. 2017. Inefektifitas Pengaturan *Presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No.4.
- Munawarman, Abdul., dan Novita Anggita. 2023. Analisis Tentang *Presidential threshold* Dalam Kepentingan Oligarki. *Jurnal Rechtan*. Vol. 3, No. 2.
- Ramadhan, Diastama Anggita. 2019. Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No. 4.
- Ria Casmi Arrsa. 2014. Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11, No. 3.
- Roni Lukum. 2011. Pilkada Langsung dan Implikasinya Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Menuju Pembangunan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Legalitas*.
- Sigit Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Sodikin. Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial. *Rechtsvinding*, Vol. 3, No. 1
- Tan, D., 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No.8.
- Widaningsih. 2014. Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19, No. 1, hlm. 98.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023

Kementerian Dalam Negeri, 2016, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,” hlm. 60.

Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014

Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu tahun 2014

## **Sumber Lain**

Agus Yulianto, Refly Harun Bantah 3 Dalil MK Soal Pemberlakuan *Presidential threshold*, <https://rejabar.republika.co.id/berita/r6bf2r396/refly-harun-bantah-3-dalil-mk-soal-pemberlakuan-presidential-threshold>, diakses pada tanggal 7 November 2023

Allan Fatchan Gani, Menggugat *Presidential threshold*, <https://news.detik.com/kolom/d-4081785/menggugat-presidential-threshold>, diakses pada tanggal 12 November 2023

CNN Indonesia, 6 Partai Rapatkan Barisan Gugat *Presidential threshold* 20 Persen, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220224150137-617-763561/6-partai-rapatkan-barisan-gugat-presidential-treshold-20-persen>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 20.45

Didik Mashudi, Prof Dr Mahfud MD Usulkan pada Pilpres 2024 *Presidential threshold* Harus Diturunkan, Ini Alasannya, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/07/15/prof-dr-mahfud-md-usulkan-pada-pilpres-2024-presidential-threshold-harus-diturunkan-ini-alasannya>, diakses pada tanggal 8 November 2023

Dwi Andayani, Disederhanakan Ini Opsi Tampilan Surat Suara Untuk Pemilu 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5996736/disederhanakan-ini-opsi-tampilan-surat-suara-untuk-pemilu-2024> , Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023

Fauzi, Pakar Hukum Tata Negara Sebut *Presidential threshold* Sesuai UUD 1945, Antara Kantor Berita Indonesia, <https://www.antaraneews.com/berita/2615521/pakar-hukum-tata-negara-sebut-presidential-threshold-sesuai-uud-1945>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023

Pengamat: *Presidential threshold* Konspirasi Jahat Partai Besar”, [https://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.%20Besar.%20diakses%20pada%2017#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2014/01/25/1115549/Pengamat.Presidential.Threshold.Konspirasi.Jahat.Partai.%20Besar.%20diakses%20pada%2017#google_vignette), diakses pada tanggal 7 November 2023

Syamsuddin, Haris, Salah Kaprah *Presidential threshold*, <https://nasional.sindoneews.com/berita/683795/18/salah-kaprah-presidential-threshold> , diakses pada tanggal 11 November 2023